

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DESENTRALISASI
DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu)

Oleh :

Vona Dwi Nugraha

Pembimbing : Restu Agusti dan Devi Safitri

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : yonadwin@yahoo.com

*Effect of Budget Goal Clarity Decentralization and Public Accountability on SKPD
Managerial Performance (Empirical Study on SKPD Indragiri Hulu)*

ABSTRACT

This research examine the effect of Budget goal clarity, Decentralization and Public accountability on SKPD managerial performance. The population on this research were SKPD at Indragiri Hulu, and sample was determined based on judgement sampling method total 116 and use slovin formula, so that with 54 respondents. Collected with a direct survey using questionnaire that sent to Top and Middle manager at every selected SKPD in the region of Padang. Multiple regression analysis are used as analysis method with using Statistical Package For Social Science (SPSS) as the tools. This research proves that 1) Budget goal clarity significant positive impact on SKPD managerial performance (H1 accepted), 2) Decentralization significant negative impact on SKPD managerial performance (H2 rejected), 3) Public accountability significant negative impact on SKPD managerial performance (H3 rejected). From this research we can suggest that: 1) For all unit of government in Indragiri Hulu region to increase the implementation of budget goal clarity, decentralization and public accountability. It will give a good impact on managerial performances at the SKPD. 2) For future research, it is better to use a direct interview method to the respondent. So that the answer collected from the respondent are more clearly. 3) For future researcher, it is better to add the other related variable.

Keywords: *Budget goal clarity, Decentralization, Public accountability, Manajerial performance.*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dimana sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat ke pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Yaitu dengan memberikan

pelayanan yang efektif maka akan dapat menyentuh masyarakat. Sebagai salah satu bagian dari organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penilaian dari kinerja ini menjadi sorotan dari berbagai pihak dan terlebih lagi

adanya otonomi daerah di Indonesia yang akan memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur urusan yang ada di daerahnya.

Kinerja manajerial merupakan suatu kinerja individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan (*Mahoney et al 1963*). Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparaturnya pemerintah (Sedarmayanti, 2004).

Persoalan yang muncul dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu adalah rendahnya realisasi program atau kegiatan dan lemahnya pencapaian anggaran yang tidak mencapai target sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan tingginya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD 2013 Kabupaten Indragiri Hulu. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingginya SILPA ini menggambarkan kinerja SKDP di lingkungan pemerintahan Indragiri Hulu masih lemah. Penyebab dari lemahnya serapan anggaran ini adalah tidak berjalannya dengan efektif program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang menjadi tradisi setiap tahunnya SKPD diharuskan untuk segera meningkatkan realisasi program dan kegiatannya pada saat menjelang

akhir tahun. Ini mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran dan tidak maksimalnya sasaran kegiatan program yang menggunakan dana APBD. Jadi hal ini mengakibatkan penilaian yang buruk terhadap kinerja manajerial yang dilakukan oleh SKPD (www.inhukab.go.id).

Menurut Kenis (1979) dalam Budi (2011), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Jadi kejelasan sasaran anggaran akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menetapkan target anggaran serta mempermudah pelaksana anggaran dalam merealisasikannya. Secara langsung ini akan mempengaruhi kinerja dan akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. (Annisa, 2013).

Variabel lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja manajerial SKPD adalah desentralisasi. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang kepada jenjang lebih rendah untuk mengambil kebijakan secara independen. Dengan pendelegasian wewenang ini akan meringankan manajemen yang lebih tinggi. Tingginya tingkat desentralisasi merupakan bentuk yang tepat untuk menunjang pencapaian kinerja manajerial yang lebih baik.

Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada SKPD sehingga SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan

pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di Indonesia, maka SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan.

Dengan adanya pendelegasian wewenang, maka disertai pula dengan pelimpahan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan anggaran serta pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban ini dinamakan dengan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2006).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu? 2) Apakah *desentralisasi* berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu? 3) Apakah *akuntabilitas publik* berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menguji dan membuktikan pengaruh

kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. 2) Menguji dan membuktikan pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. 3) Menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat instansi tersebut (Sedarmayanti, 2004).

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan bertanggungjawab atas entitasnya, misalnya: dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olah raga dan lainnya. Kinerja suatu unit kerja pemerintah daerah dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2006).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran lazim

desebut perencanaan dan pengendalian laba yaiyu poses yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif.

Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih rendah (Krismiaji, 2009). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah.

Adanya otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk desentralisasi dimana

pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya juga melimpahkan sebagian kewenangannya kepada satuan-satuan kerja dibawahnya baik berupa pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab.

Mardiasmo (2009) menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sector publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan public yang baik.

Penelitian Relevan

Bangun (2009), yang meneliti dengan judul pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi dan mendapatkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Afrida (2013), yang meneliti dengan judul pengaruh desentralisasi dan system pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial SKPD mendapatkan hasil bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Annisa (2013), meneliti dengan judul pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah mendapatkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Putra (2013), meneliti dengan judul pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah dan mendapatkam hasil bahwa akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Septiyani (2010), melakukan penelitian dengan judul pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi dan mendapatkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran sebelum dan sesudah dimoderasi dengan komitmen organisasi

berpengaruh negative signifikan terhadap AKIP.

Efendi (2013), meneliti dengan judul pengaruh kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi sebagai variabel moderating terhadap kinerja manajerial dan mendapatkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Damanik (2011), melakukan penelitian dengan judul Budgetary Goal Characteristic dan keadilan procedural terhadap kinerja manajerial dan mendapatkan hasil bahwa kejelasan sasaranm anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD

Menurut kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas ini, maka adanya kemudahan dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau gagalnya pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran bingung, tidak tenang serta tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Hasil penelitian Deki (2013), bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial pemerintah. Pengaruh antara kejelasan

sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD adalah bahwa anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.

H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Hubungan Desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD.

Menurut Krismiaji (2009) Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih rendah. Organisasi yang terdesentralisasi adalah sebuah organisasi yang memiliki kebijakan bahwa pembuatan keputusan tidak dipusatkan di manajemen pusat, namun pembuatan keputusan disebar atau dilakukan oleh seluruh manajer pada berbagai jenjang sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil penelitian Annisa (2013), bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah. Pengaruh antara penerapan desentralisasi dengan kinerja pemerintah adalah bahwa semakin baik penerapan desentralisasi maka kinerja pemerintah juga akan tercapai.

H2 : Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Hubungan Akuntabilitas Publik terhadap kinerja manajerial SKPD.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2006).

Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas public dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Fakhri (2011) menguji Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kinerja manajerial.

H3 : Akuntabilitas public berpengaruh signifikan positif

terhadap kinerja manajerial SKPD.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi pada seluruh Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Penentuan sampling ditetapkan dengan teknik purposive sampling. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian/Seksi/Sub Bagian yang berhak dalam menyusun dan melaporkan anggaran.

Jenis data dalam penelitian ini ialah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuisisioner. Kuisisioner diberikan langsung kepada responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan.

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah Kinerja manajerial SKPD (Y).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas ialah Kejelasan sasaran anggaran (X_1), Desentralisasi (X_2), dan Akuntabilitas public (X_3).

Dalam penelitian ini digunakan kuisisioner. Kinerja dapat dilihat dari ;

1. Perencanaan
2. Investigasi
3. Koordinasi
4. Evaluasi
5. Pengawasan
6. Pemilihan Staff
7. Negoisasi
8. Perwakilan
9. Kinerja secara menyeluruh

Untuk kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dari :

- pengumpulan data dan informasi yang diperlukan
- pengelolaan dan penganalisaan data dan informasi
- penyusunan dan penyajian anggaran secara teratur dan sistematis
- pengkoordinasian pelaksanaan anggaran

Desentralisasi dapat dilihat dari :

- pemberian wewenang untuk jumlah anggaran
- pemberian kewenangan untuk menentukan program dan kegiatan
- penunjukkan kewenangan dalam menentukan keterlibatan pegawai
- pemberian kewenangan untuk menentukan penambahan dan mutasi pegawai

Akuntabilitas Publik dapat dilihat dari :

- akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
- akuntabilitas proses
- akuntabilitas program
- akuntabilitas kebijaksanaan

Metode Analisis Data

Uji Validitas dan Reabilitas

Sebelum dibagikan kuisisioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*), yang dilakukan pada 30 aparatur sipil negara pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil Uji Coba Instrumen

Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item total*

correlation. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $n=30$ adalah 0.3061.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,1. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,1$ maka data tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,1$ maka data berdistribusi normal.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) dan toleransi. Jika $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas tapi jika $VIF > 10$ dan $tolerance > 0,1$ berarti terjadi multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *glejser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $sig > 0,1$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel independen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2007).

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y_1 = Kinerja Manajerial SKPD

a = Konstanta

$b_1, b_2,$ = Koefisien regresi

X_1 = Kejelasan sasaran anggaran

X_2 = Desentralisasi

X_3 = Akuntabilitas publik

e = Kesalahan pengganggu (error)

Uji F (F-test)

Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,1$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 90% atau (α) = 0,1.

Uji Hipotesis

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t_{hitung} yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 10\%$ berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis ialah 90% atau (α) = 0,1 (10%).

Definisi Operasional

1. Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hasil dari proses aktivitas manajerial sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan manajerial mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan.

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut.

3. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih rendah.

4. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner,

digunakan *corrected item-total colleration*. Jika r hitung $>$ r tabel, maka data dikatakan valid, dimana r tabel untuk $N = 54$ adalah 0,3365. Untuk instrumen kinerja manajerial SKPD diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,636. Instrumen kejelasan sasaran anggaran nilai terkecil 0,416, untuk instrumen desentralisasi dengan nilai terkecil sebesar 0,553, dan untuk instrument akuntabilitas public dengan nilai terkecil sebesar 0,401.

Tabel 1
Nilai Corrected Item-Total
Correlation terkecil

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil
Kinerja Manajerial (Y)	0,636
Kejelasan sasaran anggaran (X2)	0,416
Desentralisasi (X1)	0,553
Akuntabilitas public (X3)	0,401

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar dan bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrument pertanyaan lebih besar dari 0,6 (Ghozali :2007).

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen variabel kinerja manajerial SKPD 0,960. Untuk variabel kejelasan

sasaran anggaran 0,831, untuk variabel desentralisasi 0,951, dan untuk variabel akuntabilitas public 0,920.

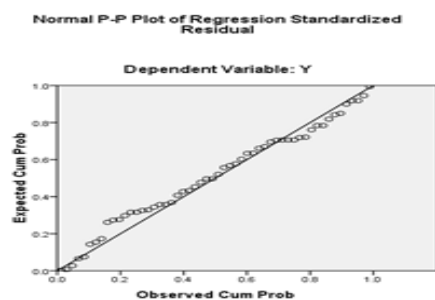
Tabel 2
Nilai *Cronbach's Alpha*

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Kinerja Manajerial (Y)	0,960
Kejelasan sasaran anggaran (X2)	0,831
Desentralisasi (X1)	0,951
Akuntabilitas public (X3)	0,920

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *OneSample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,1 atau 10%. Jika signifikan yang dihasilkan > 0,1 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,1 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Gambar 1



Dari Tabel hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,788 dengan signifikan 0,565. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

Tabel 3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	54
Normal Parameters ^{a,b} Mean	.0000000
Std. Deviation	4.97814768
Most Extreme Differences	
Positive	.107
Negative	.069
Kolmogorov-Smirnov Z	-.107
Asymp. Sig. (2-tailed)	.788
	.565

Pengujian Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam tabel di atas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

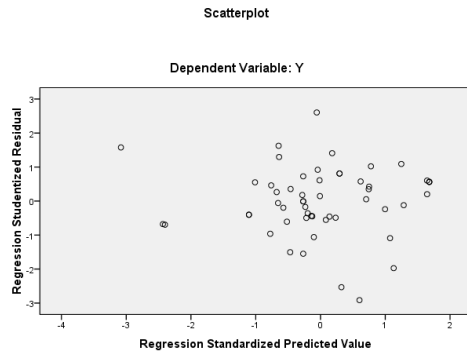
Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya sig > 0,1 atau 5%. Jika 12 signifikan di atas 10% maka disimpulkan model regresi tidak

mengandung heteroskedastisitas.

adanya

Gambar 2



Berdasarkan gambar, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Absut. Tingkat signifikansi > α 0.1, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedasitas.

Analisis Data

1. Koefisien Determinasi

Tabel 4
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 ^a	.580	.555	5.125317

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan Tabel, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,580. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas public adalah sebesar 58% sedangkan 42% ditentukan oleh factor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Persamaan Regresi

Tabel 5

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.955	3.429	.278	.782
	X1	1.249	.252	.832	4.964
	X2	.057	.183	.038	.313
	X3	-.145	.171	-.126	-.846

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel di atas dapat menghasilkan model analisis sebagai berikut:

$$Y = 0,955 + 1,249 (X1) + 0,057 (X2) - 0,1459 (X3)$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

X1= Kejelasan Sasaran Anggaran

X2= Desentralisasi

X₃= Akuntabilitas Publik

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 23.062 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi adalah nol maka nilai kinerja pemerintah daerah adalah sebesar konstansta 23.062.

b. Koefisien regresi (b) X1

Nilai koefisien variabel X1 yaitu kejelasan sasaran anggaran sebesar 1,249 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengaruh kejelasan sasaran anggaran satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja manajerial SKPD sebesar 1,249 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai positif 1,249.

c. Koefisien regresi (b) X2

Nilai koefisien variabel X2 yaitu desentralisasi sebesar 0,057 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan adanya desentralisasi di pemerintah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja manajerial SKPD sebesar 0,057

satuan. Nilai koefisien β dari variabel X2 bernilai positif yaitu 0,057.

d. Koefisien regresi (b) X₃

Nilai koefisien variabel X3 yaitu akuntabilitas publik sebesar -0,145 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan adanya akuntabilitas publik di pemerintah satu satuan akan mengakibatkan penurunan kinerja manajerial SKPD sebesar 0,057 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X3 bernilai negatif yaitu -0,145.

Uji Hipotesis (t-test)

Uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika $\text{thitung} > \text{ttabel}$ atau nilai $\text{sig} < \alpha 0,10$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 $< \alpha 0,10$ dan nilai thitung 4,964 $> \text{ttabel} 1,674$. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai positif yaitu 1,249. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 dapat diterima. Dimana semakin baik penerapan kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja di pemerintah daerah.

b) Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika $\text{thitung} > \text{ttabel}$ atau nilai $\text{sig} < \alpha 0,10$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,756 $> \alpha 0,10$ dan nilai thitung 0,313 $<$

$\text{ttabel} 1,674$. Nilai koefisien β dari variabel X2 bernilai positif yaitu 0,057. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H2 dapat ditolak. Dimana seharusnya semakin baik penerapan desentralisasi maka semakin baik pula kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan penerapan desentralisasi (X2) yang baik terhadap kinerja manajerial SKPD.

c) Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika $\text{thitung} > \text{ttabel}$ atau nilai $\text{sig} < \alpha 0,10$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,401 $> \alpha 0,10$ dan nilai thitung -0,846 $< \text{ttabel} 1,674$. Nilai koefisien β dari variabel X3 bernilai negatif yaitu -0,145. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H3 dapat ditolak. Dimana seharusnya semakin baik penerapan akuntabilitas publik maka semakin baik pula kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan penerapan akuntabilitas (X3) yang baik terhadap kinerja manajerial SKPD.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah juga

akan semakin meningkat. Hal ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Menurut Kenis (1979) dalam Budi (2011), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel kejelasan sasaran anggaran di mana tingkat pencapaian responden rata-rata untuk variabel tersebut berada pada kategori baik sehingga kejelasan sasaran dengan semakin baik, maka akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang semakin meningkat. Dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja yang semakin baik, keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi sektor publik (SKPD) akan meningkatkan adanya kinerja yang baik.

Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi dalam organisasi sektor publik (SKPD) yang tidak baik

akan mengakibatkan kurangnya struktur yang terdesentralisasi dalam setiap SKPD tersebut dimana seorang pemimpin tidak dapat melaksanakan wewenang dengan baik terhadap bawahannya dalam pengambilan atau penetapan keputusan, sehingga kinerja manajerial pada SKPD indragiri Hulu dikatakan kurang baik. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian dari Andarias Bangun (2009) tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai variable pemoderasi (Studi Pada Pada Pemerintah Deli Serdang), yang menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik dalam organisasi sektor publik (SKPD) yang tidak baik akan mengakibatkan kurang efektifnya kinerja dalam setiap SKPD, dimana sebuah amanah yang diberikan oleh atasan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bawahannya dan hal ini dapat mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja manajerial tersebut, sehingga kinerja manajerial pada SKPD indragiri Hulu dikatakan kurang baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial

SKPD Indragiri Hulu” ini adalah sebagai berikut : 1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Indragiri Hulu. Hal ini sama dengan hasil penelitian terdahulu Deki (2013) dan Annisa (2013) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD. 2. Desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Indragiri Hulu. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Afrida (2013) dan Annisa (2013) yang menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD. 3. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Indragiri Hulu. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu Deki (2013) yang menyatakan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu waktu pengembalian kuisioner yang cukup lama sehingga peneliti memerlukan waktu yang banyak untuk mendapatkan hasil untuk pengolahan data. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesibukan responden dan juga beberapa responden tidak bertemu secara langsung dengan peneliti.

Saran

1. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap dengan cara mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuisioner serta

melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuisioner. 2. Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain atau menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi maupun variable intervening dalam penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. 2013. “*Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*”.ArtikeIlmiah.
- Annisa, PS. 2013.“*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*”.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Bangun, Andarias. 2009. “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi*”. Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Damanik, AZ. 2011.“*Pengaruh Budgetary Goal Characteristics dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Manajerial (Pada Pejabat Eselon III dan IV Pada pemerintah Kota Tebing Tinggi)*”. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Krismiaji. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta.UPPAMPYKPN.
- Kuncoro, M. (2003), *Metode Riset untuk Bisnis dan ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis tesis?*, Erlangga, Jakarta.
- Mahsun, Sulistiyowati dan Andre. 2006. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Ramandei, Pilipus. 2009. “*Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)*”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Septiyani, Anna. 2010. “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Statistik Untuk Penelitian*. CV Alfabeta: Bandung
- Sugiyono .2012.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung;Alfabet
- Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2007. “*Pengaruh kejelasan sasaran anggaran instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi*”, simposium nasional akutansi IX, IAI, 2006.
- Syafrial. 2009. *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Tesis.Universitas Sumatera Utara
- Umma Sekaran. 2007. *Research Methods For Bussiness*, Salemba Empat. Jakarta